"WARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"

Penerbitan Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 15 Tahun 1951 (15/1951)

Tentang: Sumpah atau janji pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang: perlu mengadakan peraturan sumpah atau janji pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, karena :

- a. tentang hal itu belum ada peraturannya;
- b. bagi anggauta-anggauta Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah ada peraturannya : ialah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1950;

Mengingat:

1. Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1948 pasal 21 dan 28 dan Undang-undang R.I. No. 3 dan 19 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 tahun 1950.
2. Keadaan darurat;
3. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapatnya pada tanggal 23 Juni 1951;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertanggung jawab, hal mana ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, harus bersumpah menurut peraturan ini pada waktu menerima jabatan atau pekerjaannya.
2. Yang dimaksud dengan pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peraturan ini ialah pegawai sebagai dimaksudkan dalam peraturan pensiun Daerah Istimewa Yogyakarta Rijktsblad 1939 Nomor 3 yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibelanjai dari anggaran dan fonds belanja Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Bunyi sumpah jabatan pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta adalah demikian:

Demi Allah :

Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saya ini, baik langsung, maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga:

Bahwa saya akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara R.I. pada umumnya dan kepentingan Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya dari pada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara R.I., Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pegawai;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur cermat dan semangat untuk kepentingan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Pasal 3

Untuk pegawai Pamong-Praja dan anggota polisi bunyi sumpah tersebut pada pasal 2, ditambah dengan kalimat yang berbunyi:

"Bahwa saya dalam membuat proses-verbaal atau keterangan lain-lainnya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar".

Kalimat mana ditempatkan tepat diatas "kalimat yang terakhir".

Pasal 4

1. Orang yang dengan surat menyatakan keberatan untuk bersumpah, karena anggapannya tentang agama, dapat menyatakan kesanggupan.
2. Bunyi kesanggupan itu sesuai dengan bunyi sumpah tersebut pada pasal 2 dan 3 : dengan perubahan, sehingga kalimat "Demi Allah saya bersumpah" menjadi "Saya menyatakan dan sanggup dengan sungguh-sungguh".

Pasal 5

1. Bagi Sekretaris Daerah, para Kepala Jawatan, Walikota Kotabesar Yogyakarta, Bupati Pamong-Praja dan golongan pegawai yang sejajar, penyumpahan ini dilakukan dihadapan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

2. Sumpah jabatan pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta diangkat dihadapan Sekretaris Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

1. Sumpah diangkat dengan mengucapkan atau membacakan bunyi sumpah tersebut pada pasal 2 atau 3 dihadapan Pembesar yang menyumpah, dengan disaksikan oleh paling sedikit dua orang.
2. Pada pengucapan sumpah semua orang yang hadir pada upacara itu harus berdiri.
3. Pembesar yang menyumpah berusaha sedapat mungkin supaya pengangkatan sumpah itu dilakukan dalam suasana khidmat.
4. Untuk pegawai Pamong-Praja, Bupati Kepala Daerah atau Wali Kota Kotabesar Yogyakarta, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengadakan pelantikan didalam mana dilakukan pengangkatan sumpah.

Pasal 7

1. Pembesar yang menyumpah membuat proses-verbaal lipat dua tentang penyumpahan itu.
2. Proses-verbaal ditanda-tangani oleh Pembesar yang menyumpah, oleh yang bersumpah dan oleh semua saksi-saksi.
3. Yang bersumpah diberi satu dari proses-verbaal tadi oleh Pembesar yang menyumpah.
4. Sehelai dari proses-verbaal tadi disimpan dalam kantor Urusan Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta beserta surat-surat keberatan dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1.

Pasal 8

1. Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menjalankan jabatan atau pekerjaannya pada tanggal peraturan ini mulai berlaku, apabila bersumpah menurut peraturan ini, dianggap bahwa sumpah itu diangkat pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.
2. Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang naik atau turun pangkat tetapi tidak pindah jabatan atau pekerjaan dan yang telah bersumpah menurut peraturan ini tidak perlu bersumpah lagi.
3. Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada tanggal peraturan ini mulai berlaku telah bersumpah sebagai pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta menurut peraturan lain, harus bersumpah lagi menurut peraturan ini.
4. Untuk pegawai Pamong-Praja menyumpahan dimaksudkan pada ayat 3 pasal ini, tidak disertai dengan pelantikan dimaksudkan pada ayat 4 pasal 6.

5. Biaya penyempahan ditanggung semuanya oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9

1. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.
2. Pada waaktu berlakunya peraturan ini mulai semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dicabut.

Anggota Dewan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Urusan Sosial,
ttd.
FARID MAKRUF

Yogyakarta, 22 Desember 1951

Wakil Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta,
ttd.
PAKU-ALAM VIII

Diumumkan pada tanggal 22 Desember 1951
Sekretaris Daerah,
ttd.
WIWOHO